



► MALIOBORO RENDAH EMISI

Parkir Swasta Harus Berizin dan Sesuai Regulasi

Stefani Yulindriani
stefani@harianjogja.com

JOGJA—Taman Parkir Abu Bakar Ali (ABA) akan diubah menjadi ruang terbuka hijau (RTH) saat diberlakukannya Malioboro Rendah Emisi pada 2025. Selain memindahkan parkir ABA, Pemda DIY memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka lahan parkir sebagai pelengkap daftar tempat parkir bagi wisatawan.

Taman Parkir ABA dibongkar karena berada di area Sumbu Filosofi di sekitar Malioboro.

► Halaman 11

Parkir Swasta...

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan tempat parkir swasta dapat menjadi pilihan parkir wisatawan yang hendak ke Malioboro.

Menurut Made, beberapa tempat parkir yang disediakan pemerintah masih belum dapat menampung kendaraan wisatawan.

"Pemerintah tidak bisa memenuhi semua kebutuhan tempat parkir sehingga swasta perlu terlibat. Dengan begitu, daftar parkir di Malioboro menjadi lebih banyak," katanya, Kamis (3/8).

Meski begitu, tempat parkir yang disediakan swasta harus berizin dan beroperasi sesuai regulasi yang ada. Regulasi mengenai tempat parkir dan tarif parkir telah diatur dalam Perda Kota Jogja No.2/2019 tentang Perparkiran dan Perda Kota Jogja No.1/2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

"Swasta tidak bisa buka parkir ilegal dengan tarif yang tidak pasti. Sudah ada Perda Kota [Jogja] berkaitan dengan parkir dan tarif parkir. Parkir itu harus berizin pengelolaannya, ketika ada yang punya ruang untuk parkir harus berizin dulu, diasesmen, berseragam dan lain-lain," katanya.

Melalui pengajuan izin parkir swasta, akan ditinjau pula kesesuaian tata ruang pada lokasi yang diajukan. Apabila lokasi tersebut tidak sesuai digunakan sebagai tempat parkir, izin tersebut tidak akan diterbitkan.

Made tidak menjelaskan

secara pasti ada berapa lokasi dan berapa kapasitasnya potensi tempat parkir swasta di Malioboro.

Selama ini, pengoperasian parkir swasta tergantung dari penyedia jasa, Pemda DIY hanya mengatur tempat parkir yang disediakan pemerintah.

Selain tempat khusus parkir yang disediakan swasta, tempat parkir di beberapa hotel di Kawasan Malioboro juga dapat menjadi alternatif.

Sesuai dokumen penataan Sumbu Filosofi yang diajukan ke The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Taman Parkir ABA akan mulai tidak beroperasi pada 2025.

Sebagai lahan milik Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tempat parkir tersebut diserahkan kepada Kraton dan dialihfungsikan menjadi RTH.

Sejak awal didirikan, Taman Parkir ABA hanya akan beroperasi sementara, sehingga bangunannya pun didesain dengan *knock down* yang dapat dibongkar kembali.

Pemda DIY masih mengkaji konstruksi bangunan Taman Parkir ABA untuk digunakan kembali di masa mendatang.

"Kami sedang melihat keamanan konstruksi [Taman Parkir ABA], kalau sudah tidak digunakan, bangunan *knock down*-nya akan dilihat apakah masih bisa dimanfaatkan atau tidak, bukan berarti memindahkan bangunan di sana ke suatu tempat," katanya.

Pemda DIY telah menyiapkan beberapa alternatif daftar tempat parkir di sekitar Malioboro antara

lain Taman Parkir Ketandan, Taman Parkir Beskalan, Taman Parkir Senopati, dan Taman Parkir Ngabean.

Sebelumnya, Sekda DIY Beny Suharsono menjelaskan Gubernur DIY Sri Sultan HB X membuka kemungkinan sebagian lahan milik masyarakat dapat digunakan sebagai tempat parkir.

"Pak Gubernur sudah bilang kalau ada swasta mau buka, rumahnya *nganggur gede* [rumah besar dan tidak digunakan], silakan saja," katanya.

Penataan Lalin

Ni Made Dwipanti mengatakan penerapan Malioboro Rendah Emisi masih terus dikaji dengan beberapa pihak terkait.

Uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut akan diterapkan apabila kendaraan listrik sudah mulai beroperasi. Namun, dalam waktu dekat, Made memastikan belum ada perubahan rekayasa lalu lintas di sekitar Malioboro.

"Nanti tergantung hasil uji cobanya seperti apa [kendaraan listrik], kemudian fasilitas angkutan umum yang ke Kawasan Sumbu Filosofi [dengan] *pilot project* di kawasan Malioboro menggunakan rute yang sudah berjalan," katanya.

Untuk mendukung kebijakan Malioboro Rendah Emisi, Pemda DIY telah merancang penggunaan kendaraan listrik. Analisis, kajian, uji coba prototipe juga telah dilakukan.

Dalam waktu dekat becak kayu yang sebelumnya telah diuji Pemda DIY pun akan masuk lelang.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005